

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan literatur ini, akan menjelaskan antara perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Literatur yang digunakan menjadi rujukan untuk mengkaji bagaimana pendekatan dan metodologi yang diterapkan penelitian terdahulu, sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian penulis. Selain itu dengan membandingkan berbagai perspektif penulis tidak hanya menelaah posisi penelitiannya, namun juga mampu mengidentifikasi adanya kesenjangan peneliti atau *research gap* data literatur yang telah ada.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No.	Nama, Tahun	Penulis	Perbedaan	Hasil Temuan
1.	Implementation of Human Security Principle in Pattani	Anton Minardi, Mohd Komarulnizan Abdullah	Kajian ini lebih membahas pada penerapan prinsip Hak Asasi Manusia global seperti UDHR dan ICESR dalam konflik Pattani. Kemudian secara khusus menyoroti ketiadaan atau kelemahan peran dari lembaga internasional seperti PBB, OKI, ASEAN, dalam menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Pattani.	Di wilayah Pattani masih terusterjadi krisis kemanusiaan serta pelanggaran HAM yang terus berlangsung, kemudian juga terdapat lebih dari 2.000 pos militer berada di wilayah Pattani serta patroli penjagaan militer sering kali terlihat diberbagai titik juga konflik tersebut ditandai dengan adanya beberapa ledakan bom di sejumlah wilayah. Akar masalah historis yang di tandai dengan peresmian perjanjian antara Inggris dengan Siam serta kebijakan asimilasi pemerintah Thailand yang represif seperti kewajiban menggunakan bahasa dan nama Thai, memprioritaskan budaya Buddha, serta membatasi penerapan syariat Islam

No.	Nama, Tahun	Penulis	Perbedaan	Hasil Temuan
				dalam masalah keluarga serta waris bagi warga Pattani. Pasifnya lembaga internasional yang dinilai lebih mengutamakan prinsip non-intervensi terhadap kedaulatan Thailand daripada penegak Hak Asasi Manusia, sehingga mengakibatkan munculnya keinginan yang luas di kalangan masyarakat Pattani untuk merdeka penuh dan membebaskan tanah warisan kesultanan Pattani, akan tetapi sebagian warga yang berada di bawah tekanan dan juga kekhawatiran akan penindasan rezim lebih memilih tuntutan otonomi khusus sebagai pilihan yang realistis.
2.	Runtuhnya Kesultanan Patani dan Dampaknya bagi Masyarakat Patani pada abad ke-20 (2020)	Abdulbarit Chetae, Agus Fiadi	Kajian ini melihat peristiwa sejarah abad ke-20 dengan menggunakan metode historis untuk melihat kronologi bagaimana runtuhnya kerajaan Pattani. Kemudian juga mencari apa yang menjadi faktor dari runtuhnya kesultanan hingga melihat bagaimana kondisi umat Muslim dibawah pimpinan rezim pemerintah Thailand.	Pemerintah Thailand mulai menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menghilangkan identitas Melayu-Muslim serta menggantinya dengan identitas nasional Thailand yang berbasisi Budhisme. Di dalam aspek politik, pemerintah Thailand memberlakukan strategi dominasi dan juga taktik <i>divide and rule</i> dengan cara membagi wilayah Pattani menjadi tujuh wilayah untuk mencegah persatuan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, pemerintah Thailand memberlakukan pengeksploitasian terhadap sumber daya alam seperti karet serta timah guna kepentingan pembangunan di Bangkok. Sedangkan dalam aspek budaya dan pendidikan, pemerintah Thailand menerapkan

No.	Nama, Tahun	Penulis	Perbedaan	Hasil Temuan
				undang-undang yang mewajibkan penggunaan bahasa Thai serta pengajaran etika Buddha di sekolah-sekolah.
3.	Minoritas Muslim Melayu Patani: Perjuangan Hak dan Identitas di Thailand (2023)	Nurfalina Yuliana, Nur Anisah Hasibun, Riri Anggraini, Fitri Rahmawati.	Kajian ini lebih menekankan pada bagaimana perjuangan hak dan juga identitas masyarakat minoritas dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Melihat bagaimana sejarah terkait dengan minoritas serta perjuangan hak, kemudian membahas mengenai kondisi masyarakat Pattani dari aspek politik, ekonomi, dan juga pendidikan, hingga mengambil sudut pandang masyarakat dalam menjelaskan konflik yang terjadi.	Masyarakat Pattani di bawah pimpinan Thailand memiliki ketidakpuasan yang cukup mendalam dikarenakan mereka tidak merasa menjadi bagian dari bangsa Thai, sehingga hal ini memicu gerakan perlawanan yang dipimpin oleh elit kerajaan oleh para ulama. Perjuangan tersebut mengajukan tuntutan otonomi politik serta hak-hak dasar, seperti pengakuan hukum Islam, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, hingga penempatan pemerintahan pejabat Muslim di dalam pemerintah daerah.
4.	Analisis kebijakan Pendidikan Islam di Negara yang dilanda Konflik: Studi Kasus di Pattani Thailand (2022)	Nasrullah Djamil, Khairunnas Kajib, Helmianti	Kajian ini berfokus pada kebijakan pendidikan serta kurikulumnya, dengan memakai analisis kebijakan integrasi budaya dan agama melalui pendidikan serta melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam	Setelah kekalahan militer yang dialami oleh Sultan Muhammad akibat dari ketidakpastian peralatan tempur sehingga menjadi titik balik hukum kesultanan mulai digantikan oleh perundang-undangan Siam. Setelah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Thailand, masyarakat Pattani mulai melakukan pemberontakan dengan cara menolak mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah pemerintah serta

No.	Nama, Tahun	Penulis	Perbedaan	Hasil Temuan
			mengintegrasikan nilai nasionalisme dan budaya Buddha ke dalam sekolah Islam. Kemudian menyoroti bagaimana perbedaan kepentingan antara kurikulum pemerintah dan harapan dari masyarakat.	menuntut hak untuk mengatur diri sendiri, termasuk dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi serta pemberlakuan hukum Islam di pengadilan otonom. Titik puncak dari gerakan ditandai dengan pembentukan Gabungan Melayu Pattani Raya yang bertujuan untuk membebaskan Pattani serta politik di Thailand Selatan.
5.	Fragmentasi Pemberontakan dan Surasi Perang Sipil: Thailand Selatan Pasca Dimediasi Organisasi Kerjasama Islam (2019)	Yurisa Irawan, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Windy Dermawan.	Dengan menggunakan teori perundingan (<i>Bergaining Theory</i>), kajian ini menganalisis bagaimana perpecahan yang terjadi di antara kelompok pemberontak memperpanjang durasi perang sipil. Serta menjelaskan mengapa konflik tidak kunjung selesai meskipun sudah ada mediasi dari OKI, hingga berfokus pada kondisi objektif serta struktural internal yang dialami oleh kelompok pemberontak seperti PULO, BNR, dan lain sebagainya.	Konflik di wilayah Thailand Selatan merupakan sebuah perang sipil atau konflik internal berkepanjangan yang juga melibatkan pemerintah Thailand dengan kelompok pemberontakan dari etnis Melayu Muslim di wilayah Selatan. ketegangan ini terus mengalami pola yang berulang hingga puncaknya pada tahun 2004 melalui insiden Masjid Krue Se serta tragedi Tak Bai yang menimbulkan trauma serta kebencian mendalam masyarakat lokal terhadap aparat keamanan. Sehingga OKI terlibat sebagai pihak ketiga atau mediator guna melindungi hak-hak minoritas muslim di negara non-anggota. Walaupun OKI berhasil untuk mencegah eskalasi konflik agar tidak berkembang menjadi perang terbuka serta mencegah kekerasan yang lebih serius, OKI belum mampu mentransformasikan konflik ke dalam tahap perdamaian yang berkelanjutan atau mendudukkan kedua pihak dalam satu meja perundingan.

No.	Nama, Tahun	Penulis	Perbedaan	Hasil Temuan
6.	Peace and Conflict Studies in Thailand: The Primacy of the State's Narrative of Security (2023)	Pavin Chahavalpongpun	Kajian ini lebih membahas mengenai analisis akademik atau studi perdamaian yang berada di wilayah Thailand, dipengaruhi oleh narasi yang dibentuk oleh pemerintahannya. Kemudian memiliki fokus ruang lingkup yang lebih luas dengan membahas mengenai konflik yang berada di Selatan serta konflik royalitas kerajaan dengan oposisi di Bangkok, Thailand	Perkembangan studi perdamaian serta konflik di Thailand merupakan sebuah dinamika politik domestik serta kepentingan keamanan nasional. Jika dilihat dari sudut pandang teoritis, perkembangan studi keamanan tidak berdiri secara netral melainkan terbentuk dalam bayang-bayang narasi keamanan negara, sehingga studi perkembangan di Thailand lebih mengarah pada prioritas stabilitas negara dibandingkan dengan keamanan manusia. Selain itu pula negara juga mendefinisikan perdamaian bukan sebagai tiadanya tindakan kekerasan namun juga kondisi yang menyertakan tiga pilat utama yakni, perlindungan terhadap monarki, persatuan nasional yang tidak dapat terbagi, hingga pencegahan eskalasi konflik di wilayah Selatan.
7.	Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pengalaman Kaum Muslim Pattani (2025)	Indah Psupita, Imam Ghazali Said	Kajian ini memiliki fokus dalam meneliti peran dan diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai moderator pihak ketiga dalam konflik dengan menggunakan teori diplomasi multi jalur (<i>track one and track two</i>) hingga pendekatan Ahlussuna Wal Jama'ah (ASWAWA). Kemudian dengan	Stigma negatif dari masyarakat mayoritas terhadap Muslim Pattani dengan memberikan julukan "Khaek" untuk minoritas menunjukkan adanya diskriminasi sosial yang cukup mendalam. Ketertinggalan masyarakat Pattani dalam aspek ekonomi juga berdampak pada rendahnya motivasi belajar dan juga tingginya angka putus sekolah pada anak-anak. Meskipun setelah insiden pada tahun 2004 ketegangan masih terus terasa, diperkuat dengan terdapatnya kebijakan

No.	Nama, Tahun	Penulis	Perbedaan	Hasil Temuan
			spesifik membahas mengenai kiprah PBNY dibawah pimpinan K.H,A Hasyim Muzadi dengan misi diplomasi santri.	keamanan invasif, seperti pengambilan data biometrik wajib serta pemasangan kamera pengawas di setiap wilayah Selatan menegaskan bahwa dibutuhkannya pengakuan terhadap hak-hak dasar serta identitas khas masyarakat Pattani guna mencapai perdamaian.
8	Transformasi Pendidikan Islam di Pattani, Thailand Selatan: Kebijakan dan Dampaknya di Tengah Konflik (2024)	Abdul Hadi Lubis, M Nazir Karim	Kajian ini berfokus pada pendidikan islam termasuk pada transformasi sistem pendidikan formal, non-formal, serta informal ditengah konflik yang terjadi. Selain itu berfokus juga pada dampak penurunan kualitas pendidikan perubahan manajemen sekolah serta hambatan yang dimiliki dalam proses belajar-mengajar.	Transformasi pendidikan islam di wilayah Pattani tidak terlepas dari dinamika politik dan juga konflik berkepanjangan yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi serta tekanan politik pemerintah terhadap identitas Muslim. Konflik ini sangat berdampak terhadap kualitas pendidikan yang ditandai dengan tutupnya sekolah disebabkan oleh ancaman kekerasan, rusaknya infrastruktur pendidikan, serta munculnya trauma psikologis pada guru dan juga siswa.
9.	Exploring Magasid al-Shariah in the OIC'S Role in Addressing Muslim Minority Conflict: A case Study of Pattani, Thailand (2024)	Suciyani, Faisol Mamaeng.	Kajian ini berfokus pada menjelaskan bagaimana peran Organisasi Kerjasam Islam (OKI/OIC) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Menggunakan perspektif Maqasid al-Shariah yakni perlindungan jiwa, agama, akal, keturunan serta harta,	OIC resmi terlibat dalam resolusi konflik Thailand Selatan setelah eksalasi kekerasan yang terjadi pada tahun 2004. OIC melakukan pendekatan melalui diplomasi damai yang tetap menghormati kedaulatan dan juga integritas wilayah Thailand. Selain itu OIC juga berhasil membuka jalur komunikasi antara pemerintah Thailand dengan kelompok kelompok pembebasan seperti mendorong keterlibatan

No.	Nama, Tahun	Penulis	Perbedaan	Hasil Temuan
			kemudian juga melibatkan peran aktor sebagai pihak ketiga serta kerjasama diplomatik dengan Malaysia sebagai fasilitator.	Malayasia sebagai fasilitator untuk terus menerus melakukan proses dialog damai.
10.	Prioritizing Patani? Indonesian Human Security Diplomacy Towards the Issue ThailandDeep South Provinces (2025)	Sidik Jatmika, Zain Maulana, Ajeng Puspa Marlinda.	Kajian ini menganalisis mengenai alasan mengapa kebijakan luar negeri Indonesia tidak memprioritaskan diplomasi keamanan manusia dalam isu Pattani. Selain itu, melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia pada era Presiden SBY vs Presiden Jokowi, Malayasia, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan juga NU. Kemudian berfokus pada hubungan diplomasi antar negara di dalam upaya perdamaian.	Terdapat pergeseran yang signifikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik di Pattani, Thailand Selatan. Meskipun Indonesia memiliki pengaruh politik yang cukup besar untuk bertindak sebagai akseptator perdamaian, akan tetapi kebijakan yang diterapkan cenderung tidak memprioritaskan isu ini. Pada periode pertama Presiden Jokowi, Indonesia cukup aktif terlibat dalam isu ini. Namun pada periode kedua keterlibatan Indonesia justru menurun dikarenakan terdapat perbedaan kapasitas diplomatik juga pergeseran fokus pemerintah yang semakin terkonsentrasi pada penanganan dampak pandemi akibat COVID-19 serta tantangan dalam aspek ekonomi global akibat krisis internasional. Organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia memberikan beasiswa keamanan untuk pemuda Muslim di Thailand Selatan sebagai upaya memperkuat keamanan manusia melalui pendidikan serta promosi pemikiran Islam moderat.

Literatur pertama dengan judul ***“Implementasi of Human Security Principles in Pattani”*** karya Anton Minardi, Mohd Kamarulnizan Abdullah membahas mengenai penerapan prinsip dalam Hak Asasi Manusia seperti UDHR dan ICESR dalam konflik Pattani. Kemudian di wilayah Pattani masih terus terjadi krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM berlangsung, juga terdapatnya lebih dari 2.000 pos militer di wilayah Pattani serta patroli penjagaan militer sering kali terlihat di berbagai titik juga konflik tersebut di tandai dengan adanya beberapa ledakan bom disejumlah wilayah. Akar masalah historik ditandai dengan peresmian perjanjian antara Inggris dengan Siam serta kebijakan asimilasi pemerintah Thailand yang mewajibkan menggunakan bahasa dan nama Thai, memprioritaskan budaya buddha, serta membatasi penerapan syariat islam dalam masalah keluarga dan waris bagi warga Pattani. Pasifnya lembaga internasional yang dinilai lebih mengutamakan prinsip non-intervensi terhadap kedaulatan Thailand daripada penegak Hak Asasi Manusia sehingga mengakibatkan muncul keinginan yang luas di kalangan masyarakat Pattani untuk merdeka penuh dan membebaskan tanah warisan kesultanan Pattani, akan tetapi sebagian warga yang berada di bawah tekanan dan kekhawatiran akan penindasan rezim memilih tuntutan otoritas khusus sebagai pilihan yang realitas (Minardi & Abdullah, 2025.).

Literatur kedua dengan judul ***“Runtuhnya Kesultanan Pattani dan Dampaknya bagi Masyarakat Pattani pada abad ke-20”*** karya Abdulbasit Chetae dan Agus Fiadi membahas mengenai peristiwa sejarah abad ke-20 dengan menggunakan metode historis untuk melihat kronologi runtuhnya kerajaan Pattani. Kemudian juga mencari faktor yang menjadi penyebab akan runtuhnya kesultanan hingga melihat bagaimana kondisi umat islam di bawah rezim pemerintahan Thailand. Akan tetapi penelitian karya Abdulbasit Chetae dan Agus Fiadi ini memiliki kesamaan yakni menjadikan wilayah Pattani sebagai fokusnya serta masyarakat Melayu muslim sebagai aktornya serta menekankan bahwa masyarakat Pattani tidak pernah menganggap dirinya menjadi bagian dari bangsa Thai. Serta membahas

mengenai runtuhnya kesultanan Pattani dan perjanjian Inggris-Siam yang menjadi faktor akan terjadinya integrasi paksa wilayah kedalam kedaulatan Thailand.

Literatur ketiga dengan judul **“Minoritas Muslim Melayu Pattani: Perjuangan Hak dan Identitas di Thailand”** karya Nurfalina Yuliana, Nur Anisah Hasibun, Riri Anggraini, Fitri Rahmawati lebih menekankan pada perjuangan hak dan juga identitas dari masyarakat minoritas dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan sejarah terkait minoritas dan perjuangan haknya. Dalam kajian ini juga melalui sudut pandang masyarakatnya membahas mengenai kondisi yang dialami oleh masyarakat Pattani dari aspek politik, ekonomi, dan juga pendidikannya. Dalam kajian ini terdapat persamaan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif melihat bagaimana masyarakat muslim Melayu sebagai objek pertama kelompok minoritas yang berjuang untuk mempertahankan identitasnya (Nurfalina et al., 2023)

Literatur keempat dengan judul **“Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Negara yang di Landa Konflik: Studi Kasus di Pattani Thailand”** karya Nasrullah Djamil, Khairunnas Kajab, dan Helmiati membahas mengenai kebijakan pendidikan dan juga kurikulum menggunakan analisis kebijakan integrasi budaya dan agama melalui pendidikan, kemudian juga melihat upaya pemerintah dalam mengintegrasikan nilai nasionalisme dan budaya Buddha ke dalam sekolah Islam serta lebih menyoroti bagaimana perbedaan kepentingan antara kurikulum pemerintah dan harapan masyarakatnya. Subjek dan juga lokasi yang berfokus pada masalah masyarakat muslim di wilayah Pattani menjadi persamaan dari kajian ini, membahas mengenai ketegangan yang ada antara kebijakan pemerintah pusat dengan identitas antara kebijakan pemerintah pusat dengan identitas lokal masyarakat muslim Melayu.

Literatur kelima dengan judul **“Fragementasi Pemberontakan dan Durasi Perang**

Sipil: Thailand Selatan Pasca dimediasi Organisasi Kerjasama Islam” karya Yurisa Irawan, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Windy Dermawan dengan menggunakan *bargaini theory* (teori perundingan) dari Barbara F. Walter, kajian ini membahas mengenai bagaimana perpecahan di kelompok pemberontak dapat memperpanjang durasi perang sipil, juga menjelaskan mengapa kesepakatan damai sangat sulit untuk dicapai meskipun sudah terdapat mediasi dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI), hingga berfokus pada kondisi yang objektif serta struktural internal yang dialami oleh kelompok pemberontak seperti PULO, BRN, dan lain sebagainya. Kajian ini dengan kajian peneliti memiliki persamaan mengenai konflik berkepanjangan di Thailand Selatan yang melibatkan identitas etnis Muslim Melayu, hingga mencatat bahwa peristiwa pada tahun 2004 menjadi pemicu eskalasi kekerasan besar pada saat ini. Keterlibatan OKI juga sebagai mediator pihak yang berupaya memfasilitasi dialog perdamaian di wilayah Pattani, kemudian memiliki pendapat yang sama pula mengenai pemicu dari konflik ini yaitu, persoalan identitas, perbedaan budaya, serta kebijakan asimilasi pemerintah Thailand yang memaksakan budaya atau bahasa Thai kepada masyarakat Pattani (Irawan, 2019).

Literatur pertama dengan judul ***“Peace and Conflict Studies in Thailand: The Primacy of the State’s Narrative of Security”*** karya Pavin Chachavalpongpun membahas mengenai analisa secara akademis mengenai studi perdamaian di Thailand yang dipengaruhi oleh narasi yang dibentuk oleh pemerintahan Thailand. Memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada penulis yakni membahas mengenai konflik yang berada di Selatan serta melibatkan konflik royalitas kerajaan dengan opisisi di Bangkok Thailand. Namun penelitian karya Pavin Chachavalpongpun memiliki kesamaan yakni isu yang bahas merupakan konflik berkepanjangan yang berada di wilayah Thailand Selatan, dengan mengidentifikasi bahwa yang menjadi akar permasalahan dari konflik tersebut adalah masalah identitas. Serta membahas mengenai pemerintah Thailand yang lebih berfokus pada sudut pandang *National*

Security dan bukannya pada sudut pandang akan kesejahteraan individu.

Literatur ketujuh dengan judul **“Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pengalaman Kaum Muslim Pattani”** karya Indah Puspita Sari, Imam Ghazali Said berfokus pada meliti peran dan diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai moderator pihak ketiga dalam konflik, dengan menggunakan teori diplomasi multi jalur (*track one and track two*) hingga pendekatan Ahlussunah wal Jama’ah (ASWAJA). Kemudian dengan spesifik membahas mengenai kiprah PBNU dibawah K.H.A Hasyim Muzadi dengan misi diplomasinya. Memiliki persamaan dalam membahas mengenai dampak negatif dari kebijakan ‘pan-thai’ pada tahun 1902 serta mencatat tragedi besar Masjid Krue Se yang terjadi dan juga tragedi Tak Bai yang menewaskan banyak pengunjung rasa dikarenakan sesak napas saat berada di truk militer untuk dibawa ke *camp* (Sari & Said, 2025.).

Literatur kedelapan dengan judul **“Transformasi Pendidikan Islam di Pattani, Thailand Selatan: Kebijakan dan Dampaknya di Tengah Konflik”** karya Abdul Hadi Lubis dan M Nazir Karim, berfokus pada pendidikan Islam termasuk perubahan sistem pendidikan formal, non-formal, serta informal di tengah konflik yang melanda. Serta melihat dampak yang berfokus pada penurunan kualitas pendidikan perubahan manajemen sekolah dan juga hambatan yang ada dalam proses belajar-mengajar. Memiliki persamaan dalam melihat akar masalah yang melibatkan kesenjangan ekonomi, tekanan politik, serta upaya asimilasi budaya dan bahasa oleh pemerintah Thailand, dan juga menjelaskan bahwasanya masyarakat Pattani berada di tengah negara Thailand yang mayoritasnya beragama Buddha (Lubis & Karim, 2024).

Literatur kesembilan dengan judul **“Exploring Magasid al-Shariah in the OIC’s Role in Addressing Muslim Minority Conflict: A case Study of Pattani, Thailand”** karya Suciyani dan Faisol Mamaeng membahas mengenai fokus utamanya yang menjelaskan

bagaimana peran organisasi kerjasama islam (OKI) dalam penyelesaian konflik di wilayah Pattani dengan menggunakan perspektif Maqasid al-Shariah atau perlindungan jiwa, agama, akal, keturunan serta harta. Kemudian juga melibatkan aktor lainnya sebagai pihak ketiga serta keterlibatan Malaysia sebagai fasilitator dalam kerja sama diplomatik guna menyelesaikan konflik tersebut. Memiliki persamaan pada konflik ethnoreligius di Pattani yang melibatkan masyarakat muslim Melayu dan juga pemerintah Thailand serta membahas mengenai akar sejarah konflik seperti runtuhnya kerajaan Pattani, perjanjian Anglo-Siramese pada tahun 1909 hingga kebijakan asimilasi budaya yang dipaksakan oleh pemerintah Thailand (Suciyani & Mamaeng, 2024).

Literatur kesepuluh dengan judul ***“Prioritizing Patani? Indonesian Human Security Diplomacy Towards the Issues Thailand’s Deep South Provinces”*** karya Sidik Jatmika, Zain Maulana, Ajeng Puspa Marlinda memiliki fokus pada menganalisis alasan mengapa kebijakan luar negeri Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi tidak memprioritaskan diplomasi keamanan manusia didalam isu Pattani. Kemudian pula melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia pada era Presiden SBY vs Presiden Jokowi, Negara Malaysia, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan juga NU hingga mengarah pada hubungan internasional dan juga diplomasi antar negara didalam upaya perdamaian yang dilakukan. Memiliki persamaan yang berfokus pada isu keamanan yang berada di wilayah Pattani dengan menggunakan konsep *Human Security* sebagai acuan analisisnya terhadap penanganan konflik tersebut serta menjelaskan apa yang menjadi akar sejarah konflik termasuk identitas masyarakat muslim melayu di Thailand Selatan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta et al., 2025).

Berdasarkan sepuluh (10) tinjauan literatur di atas, peneliti meninjau bahwa penulisan diatas dapat diidentifikasi tiga kesenjangan penelitian atau *research gap*. Pertama, gap empiris yakni, mayoritas literatur berhenti pada deskripsi akar sejarah konflik dan

dampaknya terhadap masyarakat Melayu-Muslim, akan tetapi belum mengevaluasi secara sistematis mengenai isi dan implementasi kebijakan keamanan Thailand pada periode 2004-2025. Kedua, gap teoritis yakni, studi terdahulu memakai *Human Security* umumnya menggunakannya sebagai kerangka normatif-umum, belum mengoperasionalkannya ke dalam dimensi yang terukur (politik, personal, komunitas) guna membedah kebijakan negara secara spesifik. Ketiga, gap analitis belum ditemukan dalam literatur yang ditelaah secara eksplisit memposisikan ketegangan antara logika state security dan *human security* sebagai temuan sentral, alih-alih sekedar menyebutnya sebagai latar belakang masalah.

Penelitian ini mengisi ketiga kesenjangan tersebut dengan cara menganalisis kebijakan keamanan Thailand di Pattani tahun 2004 hingga 2025 melalui tiga dimensi *human security* secara operasional, untuk menunjukkan bagaimana serta sejauh mana pendekatan *state-centric* berketegangan dengan kebutuhan perlindungan warga sipil.